

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi Tahun 2021 (N-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Urusan Wajib non Pelayanan Dasar	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7 Noreg 7/209/2022 , tanggal 20 Oktober 2022 , Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Berita Dearah Tahun 2022 Nmor 43 , tanggal 20 Oktober 2022	Tenaga Kerja					15,114,594,613	14,905,340,867			
				1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	28,713,200	28,579,800			
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktudan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8,478,409,721	8,404,387,850			
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	273,501,482	268,009,560			
					Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	63,790,000	63,790,000			
					Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1,318,146,700	1,299,362,754			
					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	457,265,000	446,696,593			
				2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Dok	9	9	28,713,200	28,579,800			
					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	7,859,800	7,836,800			
					2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	-	-			
					3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	748,400	748,400			
					4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dok	1	1	975,600	975,600			
					5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dok	1	1	873,000	873,000			
					6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	1	1	8,715,400	8,715,000			
					7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	2	2	9,541,000	9,431,000			
				2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuanganyang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Dok/Bln	43	43	8,478,409,721	8,404,387,850			
					1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	14	14	8,453,531,921	8,379,649,050			
					4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	12	12	2,788,000	2,788,000			

				5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	1	1	1,219,000	1,219,000			
				6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dok	1	1	608,000	500,000			
				7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dok	14	14	19,565,800	19,539,800			
				8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	697,000	692,000			
	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi	Jenis/bln	184	184	273,501,482	268,009,560				
				3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bln	12	12	14,510,610	14,510,610			
				4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK Yang Dibeli	Jenis	145	145	115,457,332	115,456,800			
					Tersedianya Makanan dan Minuman	bln	11	11					
				5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fasilitasi Barang Cetak dan Penggandaan	bln	12	12	109,252,540	103,762,150			
				9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kegiata Rapat Koordinasi	bln	4	4	34,281,000	34,280,000			
	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli	Unit	2	2	63,790,000	63,790,000				
				10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibeli	Unit	2	2	63,790,000	63,790,000			
	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	Jenis	8	8	1,318,146,700	1,299,362,754				
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	12	12	207,500,000	200,335,814			
				4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kemanan Kantor	bln	13	13	1,110,646,700	1,099,026,940			
					Jasa Pengajian Rutin Majelis Ta'lim	bln	13	13					
					Jasa Operator Komputer	bln	13	13					
					Jasa Kebersihan Kantor	bln	13	13					
					Jasa Instruktur Senam	bln	13	13					
					Jasa Tenaga Supir	bln	13	13					
	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Unit	36	36	457,265,000	446,696,593				
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Unit	6	6	272,762,000	265,245,464			
				2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Unit	30	30	184,503,000	181,451,129			
	2		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	92	95.24	20,972,500	18,050,000				

2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	dok	1	1	20,972,500	18,050,000			
	2 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Aplikasi Silent Center	Unit	1	1	20,972,500	18,050,000			
		Jumlah Dokumen RTK Mikro	Dok	1	1					
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2.3	6.58	1,744,902,860	1,737,522,660			
2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2.3	6.58	1,624,082,200	1,616,716,800			
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Bidang Keahlian Instalasi Penerangan Institusional	org	48	48	1,624,082,200	1,616,716,800			
		Jumlah Peserta Bidang Keahlian Las Industri SMAW Institusional	org	48	48					
		Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Refrigeration Institusional	org	48	48					
		Jumlah Peserta Bidang Keahlian Perakitan Komputer Institusional	org	48	48					
		Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Manufaktur Institusional	org	48	48					
		Jumlah Peserta Bidang Keahlian Furniture Institusional	org	48	48					
		Jumlah Peserta Bidang Keahlian CCPOA Institusional	org	48	48					
		Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Sepeda Motor	org	18	18					
2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK Yang Dibina	LPK	25	75	57,668,720	57,656,240			
	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Peserta Bimtek Tata Kelola Izin Operasional LPK Swasta/BLK Komunitas	org	75	75	57,668,720	57,656,240			
2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Calon Wirausaha Baru Yang Dilatih	org	30	30	63,151,940	63,149,620			
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pemagangan pada UMKM / Pelaku Ekonomi Kreatif	org	30	30	63,151,940	63,149,620			
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	28	26.06	2,409,003,950	2,347,951,100			Untuk Ketimpangan Antara Jumlah Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan Yang Ditempatkan Dikarenakan Lebih Banyak Loker Untuk Pekerja Perempuan, Jadi Untuk Menanggulangi Hal Ini Harus Ada Dukungan Stakeholder dan Semua Pihak Baik Legislatif Serta Eksekutif Dalam Mengeluarkan Kebijakan Yang Dapat Mendukung Masuknya Jenis Investasi Baru

2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap	org	1823	932	1,865,084,450	1,820,330,700	Tidak realistsnya anggaran pada beberapa kegiatan dalam program Perluasan dan Pengembangan kesempatan Kerja yang hanya diberikan pagu anggaran Rp. 1.500.000 untuk kegiatan pembinaan Bursa Khusus sehingga kegiatan ini hanya sampai pada tahap persiapan awal, sama halnya dengan kegiatan pembinaan perusahaan pengguna tenaga kerja yang hanya diberikan anggaran sebesar Rp.1.353.000.-	Untuk Kegiatan BKK Kenapa Tidak Realistis Anggarannya Dikarenakan Adanya Refocussing Anggaran, Di Tahun Ini Juga Terjadi Kembali Refocussing Untuk Kegiatan Ini.	Perlunya dibentuk SATGAS Pemberantasan Calo yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Satpol PP Untuk Tahun 2022 dikarenakan tidak adanya sub kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja dengan outputnya yaitu Jumlah BKK yang terbina, maka dari itu tidak ada tindak lanjut untuk permasalahan ini di tahun 2022. akan tetapi lebih dimaksimalkan lagi dengan cukuo besarnya alokasi anggaran untuk sub kegiatan perluasan kesempatan kerja pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.832.080.450 dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.792.299.700 bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 932 orang dalam sub kegiatan tersebut melalui kegiatan Rabat Beton dan Pengerasan Jalan
	1 Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah peserta pendamping disabilitas	org	60	60	33,004,000	28,031,000			
		Jumlah tenaga kerja disabilitas yang ditempatkan	org	60	60					
	5 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Perkerasan Jalan	org	792	792	1,832,080,450	1,792,299,700			Program tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mengatasi pengangguran, oleh karena itu Mohon anggaran kegiatan tersebut untuk di maksimalkan. Upaya yang telah dilakukan disnakertrans melalui kegiatan : - Tenaga Kerja Mandiri - Padat Karya - Program pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
		Jumlah Tenaga Kerja Rabat Beton	org	20	20					
2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja yang Terkelola	Unit	1	1	306,794,000	305,983,400			
	1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Aplikasi SILENT CENTER yang dipelihara dan dikembangkan	Unit	1	1	300,000,000	299,189,400			
	2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Peserta sosialisasi IPK Online	org	20	20	6,794,000	6,794,000			
2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Penganggur Sementara Yang Dilatih	org	450		149,537,500	144,854,000			

	1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah TKI Bermasalah	org	20	20	26,940,000	22,262,000	Masih adanya TKI yang unprosedral dalam pemberangkatannya, sehingga sering sekali TKI asak Kab, Sukabumi yang tertangkap pada saat melakukan pemberangkatan	Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat Kab. Sukabumi mengeani aturan-aturan untuk menjadi seorang TKI/PMI	
	2 Penyediaan Layanan Teadu pada Calon Pekerja Migran	Hibah	Rp	80000000	80000000	100,500,000	100,495,000			
		Peserta Diseminasi	org	50	50					
		Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Pengolahan Hasil Pertanian	org	16	16	22,097,500	22,097,000			
5	Penerbitan Peanjangsan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Yang Dibina	prshn	75	75	87,588,000	76,783,000			
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peanjangsan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Yang Dibina	prshn	90	90	87,588,000	76,783,000	Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Perusahaan pengguna TKA, sehingga tidak tercapainya target	Mengusulkan untuk penambahan Sumber Daya Manusia, sehingga bisa tercapainya target pembinaan tersebut. Melaksanakan diskusi interaktif melalu media Zoom Meeting kepada Perusahaan pengguna TKA	Di tahun 2022 untuk kegiatan tersebut sudah disesuaikan alokasi anggaranya tidak seperti dengan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp.1.353.000, sehingga pada tahun ini lebih baik pencapaian targetnya dibandingkan tahun lau.
5	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	319,889,200	290,990,550			
2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	Jumlah Perusahaan Yang Dibina	Lembaga	100	102	16,672,500	16,495,000			
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	prshn	75	78	5,016,250	4,955,250			
	2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama	prshn	25	24	6,417,250	6,300,750			
	3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Profil Ketenagakerjaan	dok	1	1	5,239,000	5,239,000			
2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah Penyelesaian Kasus Hubung Industrial	Kasus	65	75	303,216,700	274,495,550			
	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kasus Hubungan Industrial	Kasus	36	30	226,801,750	207,519,750			
		Peserta Pemilihan Pekerja Teladan	org	292	292					
		Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Rapat Koordinasi dan Honor, Kajian Kebutuhan Hidup Layak dan Kemampuan Perusahaan, Kaji Terap Dewan Pengupahan)	org	37	37					

					Fasilitasi Hari Buruh Nasional (persiapan hari buruh nasional, evaluasi hari buruh nasional dan Forum Group Discusion (FGD))	org	100	100					
				2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	35	45	12,985,750	11,510,000			
				3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Serikat Pekerja	50	87	10,071,200	10,065,800			
				4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	org	28	28	47,392,250	41,560,000			
				5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	org	50	20	5,965,750	3,840,000			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi Tahun 2021 (N-1)
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
6	Urusan Pilihan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7 Noreg 7/209/2022 , tanggal 20 Oktober 2022 , Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Berita Daerah Tahun		Transmigrasi						113,223,500	94,536,500			
				3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	12	70,531,000	54,166,500				
				2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Transmigran yang ditinjau	KK	5	3	70,531,000	54,166,500				
				4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang di tempatkan ke luar pulau jawa	KK	5	3	55,000,000	41,252,500	Berkurangnya kuota pemberangkatan yang semula target 5 KK menjadi 3 KK, berdasarkan surat pemberitahuan dari Dirjen P2KT dan Surat dari Disnakertrans Provinsi Jawa Barat	Mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar target kuota pemberangkatan sesuai dengan perencanaan awal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, agar target bisa tercapai		
				5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Sosialisasi Informasi Program Transmigrasi (Kecamatan)	kecamatan	2	2	15,531,000	12,914,000	Menunggunya kepastian anggaran untuk kegiatan penyuluhan transmigrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak maksimal karena waktu yang sangat terbatas di akhir tahun	Terhadap kegiatan baku yang sudah direncanakan diharapkan anggaran tidak ada perubahan, sehingga tercapainya targe sesuai dengan waktu yang ditentukan		
				4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	16.6	21.58	42,692,500	40,370,000				
				2.01		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	org	250	325	42,692,500	40,370,000				

			Debaran Tahun 2022 Nmor 43 , tanggal 20 Oktober 2022		1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah KK Masyarakat Translok yang dibina		org	75	325	42,692,500	40,370,000	Kesadaran masyarakat translok terhadap penyelesaian adminstrasi bila adanya yang berhubungan dengan masalah biaya, sehingga mempengaruhi keterlambatan pencetakan sertifikat tanah	Kesadaran masyarakat translok terhadap penyelesaian adminstrasi bila adanya yang berhubungan dengan masalah biaya, sehingga mempengaruhi keterlambatan pencetakan sertifikat tanah	
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	-----	----	-----	------------	------------	---	--	--